

Menelisik Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Memfasilitasi Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Smelter

Subhan Purwadinata^{a*}, Nadia Nuril Ferdaus^a

^a *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 29-10-2024

Revised : 19-11-2024

Accepted : 26-11-2024

Keywords: *Respon of Community, Smelter, West Sumbawa Regency*

Kata Kunci: *Kabupaten Sumbawa Barat, Respon Masyarakat, Smelter*

Corresponding Author:

123adinata@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The purpose of this Community Service Activity is to examine the response of the community and government regarding the smelter development program. This activity was conducted in the villages of Benete and Maluku, West Sumbawa Regency. The activity, held in December 2021, involved 126 participants. The details of the participants include 6 local government officials, 15 youth representatives, 15 community leaders, 15 religious leaders, and 15 community members directly impacted by the Smelter project in Maluku village, as well as 15 youth representatives, 15 community leaders, 15 religious leaders, and 15 community leaders directly impacted by the Smelter project in Benete village. The method used in this activity is the interview method with informants through a qualitative approach. The research findings indicate that the local government supports the construction of a smelter in Sumbawa Regency to boost development and improve the local economy, strongly backing the smelter project in West Sumbawa Regency by facilitating land acquisition.

ABSTRAK

Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk mengkaji respons masyarakat dan pemerintah terkait program pembangunan smelter. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Benete dan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat. Rincian peserta yang terlibat adalah 6 pejabat pemerintah setempat, 15 perwakilan pemuda, 15 tokoh masyarakat, 15 tokoh agama, dan 15 anggota masyarakat yang langsung terpengaruh oleh proyek Smelter di desa Maluku, serta 15 perwakilan pemuda, 15 tokoh masyarakat, 15 tokoh agama, dan 15 tokoh masyarakat yang langsung terpengaruh oleh proyek Smelter di desa Benete. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode wawancara dengan informan melalui pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah setempat mendukung pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan roda pembangunan dan memperbaiki perekonomian masyarakat, dengan

sangat mendukung pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat dengan melakukan pembebasan lahan.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya dan menuntut adanya perubahan social budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan social budaya. Hal ini senada dengan Soemardjan, (1974:490) yang menyatakan bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Proses pembangunan nasional terus digalakkan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal maupun nasional secara berkesinambungan. Salah satu sektor pembangunan yang terus dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya lokal adalah pembangunan industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini didukung oleh pendapat Koentjaraningrat, (2002 : 84) yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan itu sendiri adalah ingin menjadikan lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat member akomodasi kepada aneka warna kebudayaan bangsa, dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa membanggakan sebagai bangsa. Senada dengan Yakob., N, dkk, (2009: 23) yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin.

Tujuan lain berkenaan dengan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi tokat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didaerah yang bersangkutan. Pembangunan daerah dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam yang berada di daerah agar dapat dijadikan sumber pendapatan negara, provinsi terutama bagi daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya pemerintah daerah harus mampu menggali potensi sumber daerah yang berpeluang untuk dikembangkan dan diolah lebih lanjut sehingga dapat bernilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satu aspek pembangunan daerah adalah

pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat di dalam tatanan perekonomian dengan eninjau bagian spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya (Sun'an, et al:2015). Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan, mengatur dan menata sekaligus melaksanakannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. pada kekuatan dan yang tersedia. Pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

Pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari kemampuan financial dan modal fisik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bila kemampuan financial daerah relatif sangat kecil dan persediaan teknologi tinggi yang sangat terbatas maka dapat mengundang para investor untuk melaksanakan investasi di daerah tersebut. Kehadiran investor untuk berinvestasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang turut berpengaruh pada percepatan berkembangnya pembangunan suatu daerah. Menghadirkan investasi merupakan suatu keniscayaan dalam proses pembangunan negara maupun daerah.

Adapun prinsip-prinsip pokok yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan sumber daya lokal menurut Aprillia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk. (2015: 3) adalah: 1) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan pengembangan. 2) Focus utama pemberdayaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi asset-aset yang ada pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. 3) Di dalam mencapai tujuan yang mereka tentukan menggunakan teknik social learning di mana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas oraganisatoris dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing.

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan industri (KI) di Nusa Tenggara Barat dengan produk unggulan sektor pertambangan. UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Batubara, telah mengamanatkan kepada setiap perusahaan tambang untuk mengolah bahan tambang di dalam negeri, yaitu dengan membangun pabrik industri pertambangan (Smelter).

Proyek smelter dan PMR oleh AMIN ini termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Keberadaan fasilitas pemurnian ini juga akan mendukung posisi Provinsi NTB sebagai wilayah dengan teknologi pertambangan mutakhir dalam peta dunia. Proyek fasilitas pemurnian oleh AMIN ini juga merupakan satu proyek Kawasan Industri Strategis yang dicanangkan oleh Pemprov NTB. Keberadaan smelter ini akan memberi

manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi wilayah KSB dan daya ungkit bagi Provinsi NTB. Secara rinci pembangunan smelter dapat memberikan keseimbangan pertumbuhan antara pulau Lombok dan Sumbawa, bangkitan ekonomi dari kegiatan-kegiatan di sekitar kawasan smelter, dan peningkatan kualitas SDM, sesuai dengan kebutuhan smelter. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal sebagai dukungan untuk semua kegiatan dan kebutuhan smelter. Seperti meningkatkan nilai tambah produk, perluasan kesempatan kerja, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/tenaga kerja serta pengembangan perekonomian wilayah secara keseluruhan.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari pembangunan Smelter adalah meningkatkan nilai tambah produk, perluasan kesempatan kerja, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/tenaga kerja serta pengembangan perekonomian wilayah secara keseluruhan. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) sebagai perusahaan yang memiliki badan hukum mengelola pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat, telah menetapkan membangun industri pertambangan (Smelter) dengan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 850 Ha termasuk untuk pembangunan industri turunannya.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokusnya adalah untuk menggambarkan secara mendalam kondisi yang diteliti, khususnya terkait dengan pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah berarti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan selaku instrumen utama sekaligus pengumpul informasi. Meskipun alat bantu seperti wawancara dan observasi yang digunakan hanya sebagai pendukung dan tidak menggantikan peran peneliti sebagai instrument utama. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang terlibat dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi informasi yang berkaitan dengan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan tipe informasi yang digabungkan dengan cara langsung dari sumber kuncinya. Diamati dari definisinya, informasi pokok merupakan informasi dasar ataupun penting yang dipakai dalam penelitian. Informasi pokok merupakan tipe informasi yang digabungkan dengan cara langsung dari pangkal kuncinya

semacam lewat tanya jawab, survey, penelitian, serta serupanya. (*sumber: dqlab.id*)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bermacam informasi yang sudah terdapat lebih dahulu, dipakai periset buat memenuhi informasi. informasi inferior ialah bermacam data yang sudah terdapat lebih dahulu serta dengan terencana digabungkan oleh periset yang dipakai buat memenuhi keinginan informasi riset. Informasi inferior dapat digabungkan lewat bermacam pangkal semacam buku, web, ataupun akta penguasa. (*sumber: dqlab.id*)

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Basrowi dan Suwandi dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif*, observasi didefinisikan sebagai metode pencatatan sistematis mengenai perilaku dengan cara mengamati individu atau kelompok yang sedang diteliti secara langsung. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian di lokasi terjadinya peristiwa, yang bisa meliputi perilaku manusia, fenomena, atau proses perubahan.

b. Wawancara

Menurut Nazir (1988), wawancara merupakan cara pengumpulan data buat tujuan penelitian lewat tahap pertanyaan jawab dengan cara langsung antara pewawancara serta responden memakai perlengkapan yang diucap bimbingan tanya jawab (interview guide). Tanya jawab merupakan metode pengumpulan informasi yang mengaitkan komunikasi langsung dengan responden ataupun informan buat mendapatkan data dengan cara langsung.

c. Dokumentasi

Dengan dokumentasi, peneliti dapat menggunakan sumber- sumber yang telah terdapat buat mensupport anggapan mereka dan mendapatkan uraian yang lebih mendalam mengenai poin penelitian, tanpa wajib melaksanakan pengumpulan informasi dengan cara langsung lewat observasi atau wawancara.

Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian merupakan analisa deskriptif kualitatif dengan bersumber pada bentuk analisa interaktif. Analisa informasi yang dipakai oleh peneliti ialah dengan metode mengungkap fenomena Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Apakah telah cocok ataupun belum cocok, setelah itu dianalisis pelaksanaannya alhasil bisa ditarik kesimpulan. Ada pula cara dalam analisa informasi ialah:

1) Pengumpulan Informasi,

- 2) Pengurangan Informasi,
- 3) Penyajian Informasi, serta
- 4) Pencabutan kesimpulan.

Pengecekan Validitas Temuan

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data yang utama adalah percobaan integritas informasi. Oleh sebab itu, pengesahan penemuan dalam penelitian ini dicoba lewat kenaikan intensitas serta triangulasi (Sugiyono, 2019).

Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif (Moleong, 2014) terdiri dari:

- 1) Langkah pralapanan. Dalam aktivitas pralapanan periset merumuskan permasalahan yang mau diulas, peneliti memastikan tempat guna riset serta mengutip posisi riset di Kabupaten Sumbawa Barat NTB
- 2) Langkah cara penerapan lapangan ialah langkah yang mencakup pengumpulan informasi serta langkah kategorisasi informasi.
- 3) Langkah analisa informasi. Langkah ini ialah dari analisa informasi yang didapat dari informan cocok dengan kesimpulan permasalahan yang sudah disusun dengan cara analitis.
- 4) Langkah kesimpulan. Langkah ini ialah langkah buat menarik kesimpulan informasi yang telah dianalisis dari informan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan data dan temuan secara langsung dari peneliti. Bagian ini cuma membagikan penjelasan naratif dari hasil penelitian. Sementara itu, bagian pembahasan menginterpretasikan makna dari hasil penelitian baik sesuai dengan harapan maupun tidak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Memfasilitasi Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Smelter. Respon masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap pembangunan Smelter yang akan dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) disambut baik oleh mayoritas masyarakat dari semua kalangan baik dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan (*Policy Maker*). Kondisi itu diperkuat oleh pernyataan informan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terlibat sebagai fasilitator pembebasan lahan, Pemerintah KSB mendukung penuh pembebasan lahan, selain itu sebuah penetapan kecamatan Maluku sebagai kawasan industri, serta telah selesai penyusunan rencana tata ruang kawasan industri dan Pemerintah desa Benete mendukung penuh pembebasan lahan, terlebih kecamatan Maluku sebagai kawasan industri.

Respon dalam bentuk jawaban yang diberikan oleh mayoritas informan setelah dilakukan pemilahan data (koding) semua informan tersebut menekankan bahwa respon

dan peranan pemerintah daerah yang harus kuat dalam menopang pembangunan Smelter dengan cara memberikan ruang yang penuh dalam pembebasan lahan sehingga dapat memperkuat harapan besar bersama masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Uraian tersebut dijawab oleh kondisi lapangan yang terjadi yaitu kesiapan pemerintah daerah telah dilakukan secara penuh perhatian dengan melahirkan berbagai aturan maupun kesepakatan lapangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Smelter dan hal tersebut telah selesai dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat walaupun ada beberapa yang masih berproses namun bukan merupakan dokumen yang terlalu substantif dan mendesak hanya merupakan dokumen yang menjadi pelengkap saja sifatnya.

Beberapa respon yang diberikan oleh informan yaitu bahwa pemerintah daerah terlibat sebagai fasilitator pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan industri Smelter, Pembangunan industri Smelter menjadi solusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat mendukung dan berkepentingan terhadap pembangunan Smelter melalui regulasi yang disusun antara lain perda RTRW dan turunannya.

Terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut pembangunan Smelter sangat baik dan terbuka terhadap masyarakat dan sedang menunggu proses realisasi dari kontrak karya yang telah ditanda tangani bersama untuk direalisasi, Pemerintah KSB telah menetapkan kecamatan Maluk sebagai kawasan industri dan industri turunannya dan Pembangunan industri turunan serta kebijakan dari langkah pemerintah telah menetapkan lokasi diwilayah kecamatan Maluk sebagai sentral yang ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya acara sosialisasi dan FGD dengan masyarakat bahkan beberapa pelaku UMKM ikut hadir khususnya disekitar wilayah kawasan industri Smelter yaitu beberapa pengusaha dari kecamatan Maluk.

Selain itu Pemda KSB sangat mendukung dan berkepentingan terhadap pembangunan Smelter, Smelter menjadi solusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi KSB. Pemerintah daerah menyambut pembangunan Smelter dengan sangat baik dan terbuka terhadap masyarakat, Pemerintah KSB telah menetapkan kecamatan Maluk sebagai kawasan industri dan industri turunannya dan wilayah kecamatan maluk sebagai sentral kawasan industri.

Adanya Smelter dan industri turunannya itu nanti akan mendukung perkembangan UKM di KSB, sekaligus akan berorientasi pada UKM lokal supaya dapat berkembang, bahkan menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa semua UKM yang terlibat akan diberikan keringanan kredit atau kredit lunak secara berkesinambungan agar pelaku usaha kecil dapat memiliki modal yang cukup dalam mengembangkan usahanya.

Di lain pihak pemerintah daerah ditingkat desa seperti pemerintah desa Benete

mendukung penuh pembebasan lahan, terlebih kecamatan Maluk sebagai kawasan industri. Dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat desa Benete yang masih nganggur agar dapat bekerja atau tidak menganggur lagi. Dengan telah ditetapkannya kecamatan maluk sebagai kawasan Industri maka segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat disertai dengan upaya pembebasan lahan dilokasi desa benete, bukit damai, desa mantun, desa maluk sebagai wujud nyata telah dilaksanakan mandat tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah dengan adanya perolehan masyarakat dalam bidang tenaga kerja khususnya yang akan diserap dalam kegiatan eksplorasi sebesar 25.000 tenaga kerja dalam aktivitas pembangunan Smelter, sangat bisa meningkatkan atau memulihkan perekonomian masyarakat pada khususnya di desa Benete, sehingga masyarakat Benete berharap agar pembangunan Smelter ini dilaksanakan secepat mungkin. Terkait kesiapan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa Benete dalam menyambut pembangunan sangat baik dan terbuka terhadap masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada misalnya pada persoalan yang kemungkinan muncul dalam pembebasan lahan di desa Benete. Adanya industri turunan untuk memperbanyak asupan tenaga kerja bagi masyarakat desa Benete dengan adanya pembangunan Smelter ini akan menunjang perekonomian masyarakat lingkaran tambang khususnya di desa Benete. Selain itu juga pemerintah desa Benete telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang ada di desa untuk bersiap menghadapi perubahan baru dalam dunia usaha mereka khususnya di desa Benete yang dijadikan sebagai tempat kawasan industri Smelter.

Secara makro dalam menjawab masyarakat terkait persoalan pembebasan lahan tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mewujudkan harapan masyarakat dengan memanasifestasikan kebijakan dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dihasilkan bahwa Sosialisasi Rencana Pembangunan Smelter dan Industri Turunannya kepada Pemilik lahan dan Fasilitas, serta Stakeholder lainnya di KSB dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2019 dan hasilnya bahwa harus dilakukan sosialisasi rencana pembangunan Smelter dan industri turunannya dan dinilai sudah cukup, masyarakat pemilik lahan dan fasilitas, serta Stakeholders lainnya setuju dan mendukung rencana pembangunan Smelter dan industri turunannya di KSB dan dibutuhkan juga sosialisasi tambahan yaitu sosialisasi tambahan yang masih bisa dilakukan kepada pihak tertentu yang membutuhkannya dan rencana lokasi Smelter dan industri turunannya masuk dalam kawasan andalan Sumbawa dan sekitarnya (PP No. 13 Th 2017 tentang RTRWN), sehingga lokasi tersebut boleh menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk dimasukkan dalam Revisi Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat yaitu seluas 1.200 Ha.

Tim Percepatan, Tim Fasilitasi, Tim Pembebasan Lahan industri Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa Penyelesaian masalah pembebasan lahan dan faslitas telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah KSB, Tim Percepatan Smelter dan Tim Faslitasi Lahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat Maluk dan Kepala Desa (Maluk, Bukit Damai dan Benete), dan dilanjutkan dengan sosialisasi pembebasan lahan dan fasilitas kepada pemilik lahan khusus untuk lokasi pembangunan industri pertambangan (Smelter) di Desa Maluk (Dusun Takris) dan Desa Bukit Damai (Agustus 2019).

Hasil Rakor dan Sosialisasi berupa terjadi/pembuatan kesepakatan bersama antara pemerintah KSB dengan pemilik lahan dan fasilitas di desa Maluk (Dusun Takris) dan Desa Bukit Damai tentang pembebasan lahan dan fasilitas untuk lokasi pembangunan industri pertambangan (Smelter) dan industri turunannya di KSB Provinsi NTB. Isi kesepakatan bersama yaitu bahwa pemilik lahan dan fasilitas bersedia melepas/menjual lahan dan fasilitas dengan harga tertinggi pada setiap klasifikasi lahan dan fasilitas sesuai hasil penilaian (appraisal) lahan dan fasilitas yang dilakukan oleh Tim Independen (Kantor Jasa Penilai Publik) Pemerintah KSB bersedia mencari lahan pengganti untuk pemilik lahan dan fasilitas yang membutuhkan lahan dan fasilitas pengganti di tempat lain. Pemerintah KSB bersedia membangun permukiman/rumah pengganti untuk Pemilik Rumah/Lahan pekarangan yang mau pindah ke tempat lain (relokasi).

Pemerintah KSB bersedia memberikan prioritas kepada pemilik lahan dan fasilitas untuk diterima bekerja di Perusahaan Smelter dan/atau Industri Turunannya, minimal 1 orang untuk setiap rumah tangga, baik pada kegiatan konstruksi ataupun operasional perusahaan sebagai kompensasi atas pelepasan/penjualan lahan dan fasilitas yang digunakan untuk lokasi Smelter dan industri turunannya. Hasil Rakor dan Sosialisasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KSB dengan pemilik lahan dan fasilitas di Desa Maluk (Dusun Takris) dan Desa Bukit Damai Tentang pemilik lahan dan fasilitas untuk lokasi pembangunan industri pertambangan (Smelter) dan industri turunannya di KSB Provinsi NTB perlu diintensifkan kepada pemilik lahan dan keluarganya agar proses pembebasan lahan lancar dan berhasil.

Sosialisasi berlangsung dari tingkat Provinsi NTB, KSB, Kecamatan Maluk, Desa dan Blok Lahan di lokasi. Hasil Appraisal diketahui 26 Klasifikasi Tanah/ Lahan di rencana lokasi pembangunan Smelter dan Industri Turunannya, dengan rincian yaitu Desa Benete 14 Kelas Lahan, Desa Bukit Damai 5 Kelas Lahan, dan Desa Maluk (Dusun Takris). Setiap Kelas Lahan mempunyai harga appraisal yang berbeda-beda. Harga lahan di Desa Benete, tertinggi Rp 20.700.000 per are dan terendah Rp 350.000 per are, Harga lahan di Desa Bukit Damai, tertinggi Rp 5.500.000 per are dan terendah Rp 600.000 per are dan Harga Lahan di Desa Maluk (Dusun Takris), tertinggi Rp 5.500.000 per are dan terendah Rp 600.000 per are.

Pembebasan lahan dan fasilitas pada rencana lokasi pembangunan Smelter dan industri turunannya di KSB Provinsi NTB oleh Tim Faslitasi dan Tim Pembebasan Lahan pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2019 dan ditemukan masih banyak hambatan/masalah dalam pembebasan lahan dan faslitas, terutama berkaitan dengan permintaan harga lahan dan fasilitas oleh pemiliknya yang terlalu tinggi, jauh di atas harga hasil Appraisal.

Lanjutan pembebasan lahan dan fasilitas oleh Tim Pembebasan Lahan yang didampingi oleh Tim Faslitasi Pengadaan Lahan KSB (September sampai Desember 2019) dan hasilnya bahwa Hasil pembebaaan lahan dan fasilitas sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu secara total dari rencana seluas 850,16 Ha, realisasinya seluas 429,91 Ha (50,57 %), dan belum realisasi seluas 420,25 Ha (49,43 %). Khusus untuk rencana lokasi Smelter (prioritas I) dari rencana seluas 154 Ha terdiri atas desa Maluk (Dusun Takris) 112,28 Ha dan desa Bukit Damai 41,72 Ha. Realisasi pembebasan Lokasi Smelter 141,98 Ha (92,19 %), desa Maluk (Dusun Takris) 102,28 Ha dan desa Bukit Damai 39,70 Ha. Lokasi Smelter belum realisasi pembebasan 12,02 Ha (7,81 %) desa Maluk 10,00 Ha dan desa Bukit Damai 2,02 Ha.

Harapan masyarakat terkait dengan munculnya pernyataan tentang sebuah keharusan pemerintah daerah dalam mengatasi muncul persoalan lahan utamanya lahan yang diperuntukkan sebagai lokasi sekitar 1.200 Ha yang diperuntukkan bagi pembangunan industri tambang (Smelter) dan industri turunannya telah diselesaikan oleh pemerintah daerah yang dilakukan dengan mekanisme dan proses yang harmonis dan dilandasi dengan kesepakatan bersama para pihak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data respon dan persepsi masyarakat berkenaan dengan pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat melalui wawancara dan koding data dalam menemukan topik dari data emik mayoritas dihasilkan temuan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat menerima dengan terbuka dan sangat setuju proses pembangunan Smelter dengan membantu menyediakan lahan untuk pembangunan Smelter.

Saran

Adapun rekomendasi yang sekiranya dapat dilakukan terkait hasil kajian respon masyarakat terhadap pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut: 1) Sehubungan dengan kontrak karya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan berbagai pihak dan informasi itu telah diketahui oleh masyarakat maka harapan mereka segera ditindaklanjuti ke tahap eksplorasi dan operasional; 2) Terkait dengan hasil kajian bahwa respon dan harapan masyarakat lingkaran tambang khususnya masyarakat kecamatan Maluk terkait

pembebasan lahan telah diselesaikan oleh pemerintah daerah dan usulan masyarakat (TOGA, TOMA, Pemuda, dan Masyarakat Terdampak) terkait peluang dan kesempatan kerja, keterlibatan dan pelatihan UKM, peningkatan kualitas usaha kecil untuk dilatih sesuai standar perusahaan baik dalam proses eksplorasi hingga operasional menjadi bagian terbesar dari harapan dan keinginan masyarakat lingkaran tambang untuk dapat ditindaklanjuti ketika perusahaan Smelter telah beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemardjan, Selo. 1974. *Setangkai Bunga Sosial*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Yakob., N, dkk. 2009. *Pengembangan Masyarakat*. Gorontalo: PNF Press.
- Aprillia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono SW. 1991. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Fajar Interpratama.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publishing.
- Amin Widjaja, T. 2008. *Dasar Dasar Customer Relationship. Management*. Jakarta: Harvarindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Subana, dkk. (2000). *Statistik Pendidikan*. Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Bambang Prasetyo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU Nomor 25 Tahun 2007 mewajibkan seluruh penanam modal melaksanakan program CSR perusahaan.